

BUKU RAPOR

EVALUASI 1 TAHUN REZIM PRABOWO-GIBRAN

20 OKTOBER 2024-20 OKTOBER 2025



NAMA: PRABOWO-GIBRAN

NIPP: 2010202420102029

DISUSUN OLEH RAKYAT INDONESIA YANG
RESAH AKAN KONDISI NEGERI INI

KONTRIBUTOR

OPINI

- Teddy Fiktorius
Setahun Bersama Prabowo-Gibran: Guru yang Masih Mengajar di Tengah Janji dan Gelisah
- Natalia Jashinta
Setahun Prabowo-Gibran: Dari Dapur Ibu, Apa yang Benar-Benar Berubah?
- Mirza
Inflasi Terjaga, Tapi Siapa yang Merasa Sejahtera?
- Roy Martin Simamora
Ketika Kesejahteraan Dosen Belum Menjadi Prioritas
- Firdaus Cahyadi
Bunuh Diri Ekologi Berlabel "Populis", Setahun Rejim Prabowo-Gibran dan Ancaman Tambang 2.500 Hektar

PROSA

- Matta Cinta S.
PERTIWI, RIWAYATMU

ILUSTRASI

- Yan yan
Melangkah Tanpa Arah
- William Barnabas Halim
Alergi Demo
- Ranti Amelia
Semua Kena Efisiensi, Kecuali...
- Yahya
Pragibs
- Aktivisual
Membaca Barisan Gangguan

CERPEN

- Api Marah
Bertemu Ibu

PUISI

- Rifqi Septian Dewantara
MBG (Makanan Ber*cutan Gratis)
- Afdal Eki Pratama
Menjadi Biasa
- Gilang Nugroho
MBG
- Ery Chandra
Kado Omdo

PUISI + ILUSTRASI

- Mutiara Hening & M. Furqon
Sajak Suntuk

Penerbit:
Indonesia Corruption Watch

Dalam masa menilai
pemerintahan Prabowo-Gibran

20 Oktober 2025

REZIM PRABOWO-GIBRAN

Tahun Jabatan 2024-2025

Biodata

Nama Lengkap	: Prabowo Subianto –Gibran Rakabuming Raka
Periode Menjabat	: 20 Okt 2024 – 20 Okt 2029
Lama Menjabat	: Satu Tahun
Total Anggaran	: 3.600 triliun (1.350 triliun untuk bayar hutang)
Nama Kabinet	: Kabinet Merah Putih
Jumlah Kementerian	: 49 Kementerian
Jumlah Wamen	: 59 Wakil Menteri
No. Aduan Masyarakat	: 08111-704-2207
Jumlah Kekayaan	: Prabowo: Rp.2.042.682.732.691 Gibran: Rp.25.271.975.620



Nama: Prabowo-Gibran
NISN: 2010202420102029



DAFTAR NILAI SATU TAHUN **PERIODE 20 OKTOBER 2024- 20 OKTOBER 2025**

Nama Presiden : Prabowo Subianto
 Nama Wakil Presiden : Gibran Rakabuming Raka
 Nama Kabinet : Kabinet Merah Putih
 Alamat Istana : Jalan Veteran No. 17, Jakarta Pusat, Indonesia
 Tahun Jabatan : 20 Oktober 2024 – 20 Oktober 2025

No	Aspek Penilaian	KKM	NILAI		Deskripsi
			Angka	Huruf	
1	Pelaksanaan Program ASTACITA	10	0	NoI	Asta Cita Pemberantasan Korupsi Hanya Omon-omon.
2	Tata Kelola Kebijakan Prioritas	10	0	NoI	Dari MBG hingga Koperasi Merah Putih: Potret Tata Kelola yang Ugal-Ugalan
3	Pencegahan Konflik Kepentingan	10	0	NoI	Jumlah kementerian bertambah, Kabinet gemuk yang tidak efektif, rangkap jabatan, dan rekam jejak yang buruk.
4	Tata Kelola Anggaran	10	0	NoI	Pemotongan anggaran yang tidak jelas dan berdampak buruk pada layanan publik
5	Penyusunan Regulasi dan Kebijakan	10	0	NoI	Manipulasi kebijakan yang menormalisasi konflik kepentingan
6	Penegakan Hukum	10	0	NoI	Pemberantasan korupsi di era Prabowo-Gibran hanya berhenti sebagai jargon politik. Dari wacana pengampunan koruptor, intervensi penegakan hukum, hingga mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset, semua menunjukkan komitmen palsu pemberantasan korupsi.
7	Penyeimbang Kekuasaan Oleh DPR	10	0	NoI	DPR hanya menjadi stempel Prabowo
Jumlah Nilai			0	NoI	Rekomendasi Tidak Lulus
Rata-rata			0	NoI	

Ekstrakurikuler		
No	Jenis	Nilai
1	Ekskul Omon-omon	A
2	Kelas Oligarki	A
3	Bisnis Ekstraktif	A

Tembusan:
 Warga Indonesia

Dikeluarkan di: Jakarta
 Tanggal: 20 Oktober 2025
 Indonesia Corruption Watch





**CATATAN KRITIS 1 TAHUN
PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN**



antikorupsi.org/id/1tahunprabowogibran



***Ditulis untuk memperingati satu tahun
pembantaian Indonesia di tangan wakil
rakyatnya sendiri:***

PERTIWI, RIWAYATMU

*Kutulis untukmu, Mali dan Sinai,
Surat wasiatku.*

Di Tenggara,
17 Agustus 2025

Aku menulis ini dengan lampu dari pijar lilin dan senapan mengarah ke kepala. Bukannya aku bunuh diri, walau kuharap aku iya, tetapi sejak pagi sudah begini: anak-anak Pak Lurah menggunakan uangku untuk jadi pembredel rumah. Lagi-lagi bapak pengantar koran itu menjadi umpan, dan seorang anak terkulai lemas karena cacingan. Seorang ibu menangis, seorang ibu menangkis, tak keduanya punya cukup perisai untuk menepis. Sepatu bot-sepatu bot berbaris, namun tak sepasang pun ikut menangis.

Kupikir-pikir, apalah perkaranya? Apakah dari kasbon koperasi kuminta secuil untuk lima suap nasi? Apakah ada ingkar kami soal padi di sawah dan hasil gerabah? Kurasa mustahil. Orang-orang ini kukenali betul wataknya. Kendati tak bisa kupilih siapa yang mesti dipercaya, aku lebih tahu mereka ketimbang yang mengaku-aku di atas kami. Ketimbang bapak bendahara dan para kepala. Ketimbang satpam sok gaul di garda terdepan dini hari. Ketimbang tukang bersih-bersih di halaman kantor kelurahan yang menyapu jejak kotor bos besar.

Pita suaraku mengering. Aku sudah menjerit, entah mereka ini Tuhan atau apa, tiada secuil pun ampun turun untuk yang sia-sia. Seluruh kata-kata, bahkan yang paling buruk pun, telah habis ditenggak telinga mereka. Cekik pasung di leher-leher kami bagai imajinasi orang ngablu, dikata-katainya bagai anjing yang berlalu. Mana mau secarik doaku dipahami, hati mereka sudah melebur dalam air mani. Agaknya doa bagi kami yang jelata selalu punya tapi; sedang mereka tak bertepi.

Mali dan Sinai, sungguh, bukan egoisku meminta kamu membaca siaran pembantaianku. Suratku akan menjadi konon di suatu masa dari sebuah negeri yang zalim akan tanah yang mereka pijak. Barangkali dengan hadirnya saksi, Sang Pemilik Karma sedikit bermurah hati. Semoga belum bubar kantor pos di mulut ngarai, semoga belum habis nyawa lilin yang menampung apesku ini. Tolong, yang aku minta hanya didengar dari kutub yang jauh. (Dan kita sama-sama aminkan: Semoga tewasku menodai kolam akal dan darahku menjadi corak yang kekal.)

*Salam sayang,
Pertiwimu.*



SEMUA KENA EFISIENSI KEQUALI: KELUARGANYA, REKANNYA, PREMAN & TUKANG PUKUL





"Kado Omdo"

Apa kabar perjalanan setahun yang
merangkak?

Masihkah kita menamba jejak langkah terang?

Janji-janji terbang, hilang dalam angin,
Adil seperti burung tanpa sayap, lelah terbang

Asa cita mencipta pusaran gelap, peluru
senyap

Melaju tapi terjepit waktu membeku

Kuasa menggulung kabut, kebenaran kian
terkikis

Jalan lama berduri, menusuk jiwa yang letih

Waktu merintih senyap, suara hati terkungkung
dalam bayang-bayang berdansa gelap

Berpakaian kelabu, menutup mata harapan

Hobi bicara seram, tapi gerak terhenti

Mengayuh hari, menanti fajar yang tak kunjung
tiba-menuju bumantara terselip di punggung
suram

Penulis:

Ery Chandra, buruh di perusahaan media.

Indonesia Emas?



SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
NEWS INDONESIA Sebaran kasus keracunan MBG Total jumlah korban: 7.119 orang	Jumlah korban tertinggi Kab. Bandung Barat 1.333 orang	Rakyat Ditindas dan Dilindas! Hentikan Kekerasan Aparat, Bebaskan Semua Demonstran	Kekerasan Seksual Mei 1998 Bukan Rumor Belaka, Lawan Upaya Culus Negara dalam Memutihkan Dosa Orde Baru!			
Sepuluh orang meninggal dalam gelombang demonstrasi – 'Negara harus menjawab tuntutan masyarakat'						
Ironi di 40 Hari Kematian Affan: Polisi Bebas, Ratusan Demonstran Masih Ditahan	Menahan: Akan Ada 15 Institusi yang Bisa Ditempati Prajurit TNI Aktif	Tunjangan Reses DPR Naik	17+8 TUNTUTAN RAKYAT	44 Ribu Orang jadi korban PKK Sepanjang 2020, Mayoritas di Jawa Barat	Penyitaan Buletin Bukti Bankrupsi Sikas Aparat pada Masa Pemerintahan dan Reformasi	

18 Tahun, Gerakan Aksi Kamisan Menolak Lupa

Satu Tahun Prabowo Gibran

Rifqi Septian Dewantara
MBG (Makanan Ber*cun Gratis)

Setiap pagi, negara menyiapkan sarapan nasional:
 sepiring optimisme, segelas janji,
 dan sepotong berita yang sudah dikunyah ulang oleh media

Kami duduk rapi di meja demokrasi,
 menyantap gizi dari kata-kata pejabat
 yang menua lebih cepat dari logika
 "Ini makanan bergizi," katanya
 sambil menaburkan statistik di atas nasi subsidi

Di luar, bau lapar masih berserakan
 di sela trotoar yang retak oleh janji pembangunan
 orang-orang antri, bukan untuk kerja,
 tapi untuk menelan harapan yang basi

Negara menamai semuanya kemajuan
 padahal kami sudah lama muntah dalam diam,
 menyembunyikan rasa getir di balik kata makmur

Setiap hidangan disajikan gratis,
 karena yang dibayar sebenarnya: kesadaran
 kami dicekoki tayangan,
 disuapi pidato,
 dan diberi piring kosong bertuliskan stabilitas

Sampai akhirnya kami kenyang—
 bukan oleh makanan
 tapi oleh kebohongan yang terus dihangatkan setiap hari
 dengan garam nasionalisme dan bumbu loyalitas.

Selamat makan, rakyat
 hari ini menu masih sama:
 Makanan Ber*cun Gratis!

BERTEMU IBU

Writer: Api Marah

Wajah sang anak itu seperti menahan dari kematian. Ia merasa dunia akan gelap, dunia akan menutup matanya. Namun, ia berusaha kuat saat badai menerjang tubuhnya. Yang lemas dan muntah-muntah itu. Tak hanya anak itu saja, Benaldo, yang dikenal pintar bahasa Inggris itu di sekolah SMP nya. Tetapi teman-temannya pun mengalami hal serupa. Saat itu, mereka muntah-muntah usai melahap makan siang gratis dari pemerintah yang menjadi fasilitas di sekolah.

Lauk-lauknya pun juga tak seperti Benaldo temui di rumah. Lauk itu porsinya sedikit. Tak mampu membuat seseorang kenyang. Kata sang Guru, yang dikenalkan menyebalkan itu, berkata, "Apapun itu disyukuri saja. Ini nikmat Tuhan."

Namun, harus mensyukuri bagaimana dengan porsi makanan seperti ini? Yang telah meracuni Benaldo dan teman-temannya? Muntah-muntah itu masih terus Benaldo alami, yang mengharuskan ia dilarikan di rumah sakit. Saat berbaring di tempat tidur, matanya seakan memaksanya untuk menutup. Namun kesadaran dirinya mengharuskan dirinya kuat dan mendapatkan pengobatan yang layak. Ayah Benaldo, yang hidup sendiri usai istrinya meninggal karena penyakit gula itu, menangis kepada anak satu-satunya itu.

Ia tak ingin Ayahnya itu mengalami kehilangan lagi. Sudah cukup rasanya ia mengalami rasa kehilangan. Ayah Benaldo terus berusaha merayu Tuhan agar anak lelaki satu-satunya itu jangan dipanggil dulu. Suara tangisan itu seakan perlahan mengabur, dan membuat Benaldo kini tak sadarkan diri.

Di ujung kegelapan, perlahan cahaya putih mengkilat menghadap padanya. Cahaya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan bau wangi yang tak bisa ia tandangi dengan wangi parfum yang selalu ia pakai. Apakah kini ia di surga?

Sosok perempuan muda di depannya tersenyum manis. Wajahnya penuh cahaya, bersih tanpa adanya kerutan. Seperti kembali muda. Barangkali, di kehidupan lain seseorang tak akan berubah tua dan akan selalu muda di tempat keabadian. Dan sosok itu, seperti wajah perempuan remaja. Meski Benaldo tahu, sosok itu adalah ibunya yang sudah tiada, yang meninggal akibat penyakit ginjal dan gula yang mengharuskannya cuci darah.

"Hai Nak, selamat datang!" seru sang Ibu.

"Ibu?" tanya Benaldo dengan wajah bingung.

"Ini Ibu, Nak. Ibu senang ada di sini. Tapi Ibu sendirian banget," cerita sang Ibu.

Bagaimana rasanya di sana Bu? Tanya Benaldo, yang dikelilingi warna putih di sekitarnya. Sang Ibu mengambil tangan anak lelaki satu-satunya yang ia sayangi itu. Dan tempat mulai berubah menjadi sebuah taman yang indah, taman yang penuh harum yang mengalahkan harum parfum. Tempat ini, sungguh lebih indah daripada hidupnya kini yang penuh biang masalah.

"Ibu sudah tahu, kamu sebenarnya diracun sama makanan yang kamu dapat di sekolah dari program pemerintah. Ibu sedih melihatnya, Nak," berkata sang Ibu, sambil mengajak Benaldo mengelilingi seluruh taman.

"Ibu, aku sekarang sama Ayah berdua," ungkap Benaldo, menghentikan langkah kakinya yang telanjang.

"Ibu sudah tahu, Ibu bisa melihat kamu bahkan dari tanaman yang ada di sini. Dan suara-suara Ibu selalu sampai ke kamu. Mungkin, kejadian itu sudah saatnya kamu temani Ibu di sini. Di tempat keabadian tanpa ada rasa sakit lagi."

"Ibu... Aku..." Benaldo tampak gagap. Ia merasa tak siap untuk mati sekarang, sebab Ayahnya sendirian.

"Ibu tahu apa yang kamu cemaskan. Ayah kamu bukan? Aku rasa, Ayah akan mudah menikah lagi," suara itu tidak begitu berat, tetapi lepas landas tanpa beban.

"Aku rasa aku cuma keracunan biasa Ibu," gumam Benaldo saat angin damai melukiskan wajahnya dan menerbangkan rambutnya.

"Iya, tapi Ibu yang meminta untuk kamu temani Ibu," balas sang Ibu dengan tersenyum.

Benaldo menggeleng, "Bu... Aku..."

"Tidak apa-apa Nak. Sungguh. Kamu akan damai di sini."

"Bu...."

"Percayalah."

"Bagaimana Ayah?"

Ibu Benaldo terdiam, menatap penuh tulus wajah anak satu-satunya itu. Merasa tak tega jika ia harus mendapatkan siksaan dan perilaku Ayahnya yang masih belum berubah. Bermain wanita dan menghiraukan Benaldo yang perlu dipikirkan masa depannya.

"Masa depan kamu ada di sini," ucap Ibunya pelan, penuh meyakinkan. Kemudian tangan sang Ibu memintanya untuk menjabat. "Ambil tangan Ibu, dan rasakan getarannya. Getaran yang damai."

Tangan itu bergerak sendirinya, tanpa adanya gerakan dari seluruh sendi Benaldo untuk mengangkat tangan itu. Seolah ada gerakan otomatis untuk menjabat tangan sang Ibu yang penuh kesepian itu, yang menginginkan anak kesayangannya itu bersamanya. Tangan itu berjabat penuh erat. Dan getaran itu terasa di aliran darahnya. Getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelahnya, ia menjadi sosok yang berbeda. Tubuhnya berada di alam ini, bukan di alam dunia tempatnya tinggal.

"Kamu sekarang sudah sama Ibu. Bagaimana rasanya?"

Seperti kedamaian yang penuh ketenangan. Namun, ketika tubuhnya terdampar di dunia, ia melihat Ayahnya meraung keras. Ia melihat tubuhnya mati dan tak bisa hidup lagi. Sang Ayah memeluk Benaldo yang tertidur pulas dan damai. Ia tak bisa merasakan tangisan, ia tak bisa menyentuh tubuh Ayahnya. Dan ia, kini benar-benar telah tiada.

Perlahan tubuhnya melayang ke langit, seakan rela tubuhnya terbang dan diterima oleh Sang Pintu Langit. Di atas langit berlapis-lapis itu, Benaldo penuh tersenyum. Ia merasakan tempat tinggal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di atas sana, sang Ibu tersenyum. Memeluk, dan berjalan bersama. Ruang itu seakan terpisah antara dunia dan dimensi lain. Dimensi itu, dipenuhi kedamaian dan ketenangan yang menyinari tubuhnya.



YANZ

Menjadi Biasa

Gemuruh

Selamat hari jadi
Dimulai dari proklamasi
Perencanaan hari jadi
Penyatuan pulau-pulau yang diplomasi
Mengingat dan seterusnya
Tumpang tindih birokrasi
Tubuh yang tersiksa

Bangsa yang ingin jadi
Dari kecacatan demokrasi
Hingga penumpasan pemikiran kiri
Bencana ekologi
Riuh simbolisasi
Semakin ketakutan

Sayap kanan yang utuh
Sayap kiri yang runtuh
Kepala yang lusuh
Badan yang keruh
Kaki yang kumuh

Meredam luka
Pesta raya sesaat
Mengingat dan seterusnya
Tumbuh menyembuhkan diri

MBG

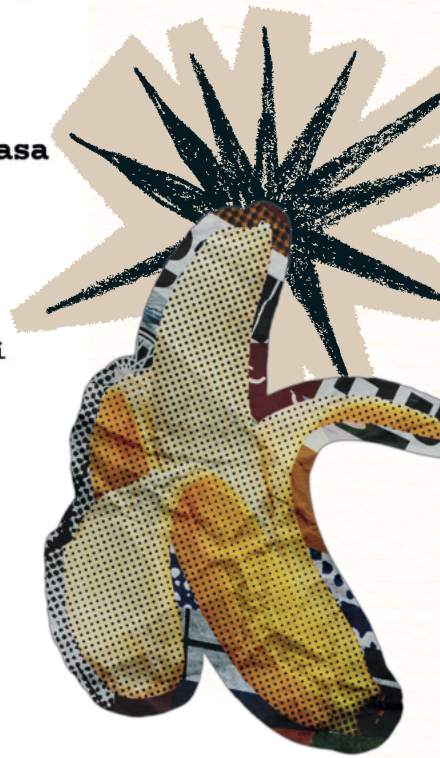
wajib belajar tapi bayar
honor guru masih horor

tapi
kok
ada smart tv baru di sekolah?

wajib belajar tapi bayar
honor guru masih horor

tapi
kok
ada makan ber**** gratis di sekolah?

Puisi oleh: Gilang Nugroho



Inflasi Terjaga, Tapi Siapa yang Merasa Sejahtera?

Sebuah Refleksi Satu Tahun Pemerintahan

Satu tahun rezim Prabowo-Gibran berjalan, narasi positif kerap menghiasi laporan makroekonomi: inflasi nasional terkendali, bahkan cenderung rendah dalam kisaran target Bank Indonesia. Angka-angka ini seolah menjamin stabilitas. Namun, jika kita melihat lebih dekat, angka inflasi makro yang “terjaga” ini menyimpan keresahan mendalam di tingkat rumah tangga. Pertanyaan mendasarnya adalah: jika inflasi rendah, mengapa daya beli mayoritas rakyat, terutama kelas menengah ke bawah, terasa semakin tergerus?

Stabilitas inflasi yang dipuji seringkali didominasi oleh Inflasi Inti (Core Inflation) yang rendah. Secara teori, inflasi inti yang rendah mengindikasikan tekanan permintaan agregat yang lemah. Dengan kata lain, harga tidak naik drastis karena daya beli masyarakat memang sedang lesu. Stabilitas yang diumumkan oleh pejabat negara mungkin bukan cermin keberhasilan pengendalian harga, melainkan refleksi dari permintaan masyarakat yang tertahan karena upah riil stagnan dan biaya hidup terus merangkak naik.

Sementara itu, komponen harga bergejolak (volatile food) tetap menjadi momok. Di satu sisi, pemerintah gencar meluncurkan program sosial dengan anggaran fantastis, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan konsumsi dan gizi. Di sisi lain, tanpa dibarengi solusi fundamental pada peningkatan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan, suntikan dana Bansos dan MBG justru berpotensi memicu demand-pull inflation (inflasi yang disebabkan tarikan permintaan) di sektor pangan. Program yang tujuannya mulia ini dikhawatirkan hanya menjadi solusi jangka pendek yang justru menekan harga kebutuhan pokok di masa depan.

Dalam laporan 100 hari atau 1 tahun, pemerintah cenderung bangga dengan pertumbuhan PDB dan stabilitas harga. Namun, saatnya menggeser fokus evaluasi: kesejahteraan rakyat sejati tidak diukur dari angka makro yang indah, tetapi dari kemampuan satu keluarga membeli kebutuhan pokok tanpa harus berutang. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus melakukan refleksi mendalam, memastikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif benar-benar diarahkan pada penguatan kapasitas produksi dan peningkatan upah riil, bukan sekadar menjaga citra stabilitas di tengah melemahnya daya beli rakyat.

Katanya sih buat “Dana Abadi Nusantara” demi masa depan rakyat. Tapi kalau dikelola tanpa transparansi, **Danantara** bisa aja jadi celengan elite, bukan buat kesejahteraan publik.

Kualitas **BBM** gak jelas, rakyat disuruh hemat. Tapi pejabat tetap jalan-jalan pakai mobil dinas. Kok yang disuruh berkorban cuma rakyat?

Revisi **RUU KUHAP** ini katanya buat reformasi hukum, tapi isinya justru membungkam rakyat. Hati-hati, demokrasi bisa makin sempit.

Warga lagi krisis gizi dijawab dengan Makan Bergizi ~~Gratis~~ (**MBG**). Nyatanya setiap hari pelajar harus berjuang agar tidak keracunan.

Bikin program makanan bergizi tapi untuk kalangan sendiri. Jadilah **SPPG** sebagai proyek cuan lingkaran satu Presiden.

Terancam diracun, dirampas tanahnya, dicekik **pajak**, dipukul aparat, ditangkap paksa, gak diajak bahas aturan, begini nasib jadi WNI.

Rantis dibeli untuk apa? Affan Kurniawan bukan korban pertama brutalitas kepolisian!

Revisi **UU TNI** dikhawatirkan bikin militer balik ke urusan sipil. Mantan menantu bisa balikan ke Orde Baru

DPR Posisinya jadi tukang stempel kebijakan, bukan jadi penyeimbang penguasa.

Ribuan keracunan, obatnya bukan permintaan maaf dari **BGN!**

YTTA, **Anarkis** (Anarkisme): ideologis anarkisme berarti penolakan terhadap otoritarianisme dan hierarki yang menindas.

1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, **ACAB**, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312, 1312.

Lewat **Tapera**, pekerja dipaksa nabung buat rumah. Tapi uangnya dikelola siapa? Aman nggak? Jangan sampai niat bantu malah jadi beban.

Conflict of Interest (**COI**) alias konflik kepentingan udah dinormalisasi di pemerintahan. Bikin aturan, tapi diam-diam nguntungkan diri sendiri.

"Kalau enggak ada wartawan saya bilang **ndasmu**,"

Proyek Sengsara Nasional (**PSN**)

Janjinya **omon-omon**, kabinetnya *omon-omon*, pejabatnya banyak *omon-omon*, hasilnya *omon-omon*



DANANTARAK
OTEMHEROCA
MAZEDHUEAA
SPPGWOUZBK
UECRANTIST
ORGSDGNWRI
FANARKISEV
IGOKRWTOOI
PAJAKOCIOIS
SRIMUWHMGU
NDASHOMONA
HUCQAZENWL
YUTOPRPPH



OPINI

Dari Dapur Ibu, Apa yang Benar-Benar Berubah?

"Anak-anakku bertanya, 'Ma, kenapa belanja makin mahal?'

... dan aku pun terdiam, mencari jawaban di balik janji-janji yang tak semua sampai ke dapur kami."

Aku seorang ibu rumah tangga di Pontianak. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, aku menyiapkan sarapan sambil menghitung ulang isi dompet. Beras, minyak, telur, dan sayur, semua naik perlahan tapi pasti.

Sudah hampir setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, tapi jujur, dari dapurku, aku belum benar-benar merasakan perubahan yang dijanjikan. Yang berubah hanya harga-harga, bukan rasa aman hidup sebagai rakyat kecil!

Pemerintah sering bicara tentang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tapi bagi kami, ibu-ibu yang setiap hari memegang uang belanja, stabilitas itu belum terasa. Data Bank Indonesia (2025) mencatat inflasi memang masih di bawah 3 persen, tapi bahan makanan seperti cabai dan bawang justru menjadi penyumbang kenaikan harga tertinggi. Di dapur, angka statistik itu terasa seperti ironi karena apa artinya "inflasi terkendali" jika uang belanja habis lebih cepat dari biasanya?

Setahun
Prabowo-
Gibran:

Pemerintah juga menggembarkan bantuan sosial, subsidi pupuk, dan kredit usaha rakyat (KUR) sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil (Kementerian Keuangan, 2025). Tapi di lingkungan tempat tinggalku, banyak yang belum tahu cara mengaksesnya. Ada ibu tetanggaku yang bolak-balik ke kelurahan hanya untuk mengurus surat keterangan tidak mampu, tapi ujungnya tetap gagal karena data di sistem belum diperbarui. Kebijakan terasa jauh di atas kertas, bukan di dapur kami.

Aku akui, beberapa hal memang mulai terlihat. Subsidi listrik sedikit meringankan beban tagihan, dan layanan kesehatan di Puskesmas kini lebih teratur daripada dua tahun lalu (Ombudsman RI, 2024). Tapi pelayanan publik itu masih seperti tambalan. Ia memperbaiki yang bocor, tapi belum menjawab akar keresahan. Harga hidup yang makin tinggi, dan masa depan anak-anak yang belum pasti.

Sebagai ibu, aku tidak terlalu paham istilah ekonomi makro atau kebijakan fiskal. Tapi aku tahu, uang Rp100.000 sekarang tak lagi bisa belanja seperti tahun lalu. Harga beras medium naik dari Rp13.000 menjadi hampir Rp17.000 per kilogram. Harga telur sempat menyentuh Rp33.000 per kilogram (BPS, 2025). Kenaikan sekecil apa pun, bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan, adalah badai kecil yang terus datang tanpa jeda.

Keresahan makin kuat ketika mendengar kabar pejabat berebut kursi, sementara rakyat berebut harga diskon di pasar. Dalam hati, aku bertanya: apakah pemerintah masih mendengar suara kami, para ibu yang menjaga rumah tangga dengan segala keterbatasan?

Meski lelah, aku tidak kehilangan harapan. Karena ibu mana yang bisa berhenti berharap?

Aku hanya ingin pemerintah benar-benar turun mendengar, bukan sekadar tampil di televisi. Jika mereka sungguh ingin mengubah nasib rakyat kecil, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan.

Pertama, buatlah distribusi bantuan lebih manusiawi. Jangan terlalu banyak syarat. Ibu-ibu di desa tak punya waktu dan biaya untuk mengurus surat-surat yang rumit. Bantuan seharusnya datang kepada yang membutuhkan, bukan yang pandai melengkapi berkas.

Kedua, stabilkan harga bahan pokok dengan melibatkan pasar lokal dan koperasi. Jika rantai distribusi bisa diperpendek, harga bisa dikendalikan. Pemerintah daerah seharusnya diberi wewenang lebih luas untuk menjaga stok dan harga pangan di wilayahnya.

Ketiga, buka kanal aspirasi langsung bagi masyarakat. Misalnya, aplikasi sederhana atau posko pengaduan di setiap kelurahan yang benar-benar aktif. Jangan biarkan suara rakyat terhenti di meja administrasi.

Meski lelah, aku tidak kehilangan harapan. Karena ibu mana yang bisa berhenti berharap?

Apakah engkau tahu, Pak Presiden, bahwa revolusi terbesar kadang dimulai dari dapur?

Aku sering berpikir, kalau negara ini bisa besar karena tangan-tangan pekerja keras, mengapa suara ibu rumah tangga tidak dianggap penting? Padahal kami yang pertama merasakan dampak dari kebijakan ekonomi: dari harga beras, listrik, hingga biaya sekolah. Mungkin sudah saatnya pemerintah membuat Forum Ibu Nasional, sebuah wadah bagi perempuan di berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung, bukan lewat perantara politikus!

Sudah hampir setahun Prabowo-Gibran memimpin. Di televisi, kata-kata "optimisme" dan "perubahan besar" terus diulang. Tapi di dapur kami, suara yang terdengar adalah deru kompor gas yang makin sering mati karena tabung belum diganti. Mungkin kami memang tidak mengerti politik tingkat tinggi, tapi kami tahu arti hidup yang semakin berat.

Janji boleh megah di panggung, tapi tolong dengarkan suara sendok yang mengaduk panci kosong di dapur rakyat. Aku masih percaya Indonesia bisa lebih baik. Tapi perubahan tak bisa hanya diucapkan. Ia harus terasa di meja makan, di piring nasi anak-anak, dan di hati ibu-ibu yang setiap hari berjuang diam-diam agar rumah ini tetap hidup.

Apakah engkau tahu, Pak Presiden, bahwa revolusi terbesar kadang dimulai dari dapur?

Bukan dari senjata, bukan dari pidato, tapi dari sepotong harapan yang terus hidup di hati seorang ibu.





Bunuh Diri Ekologi Berlabel "Populis", Setahun Rejim Prabowo-Gibran dan Ancaman Tambang 2.500 Hektar

Oleh: Firdaus
Cahyadi^[1]

Narasi Sesat dan Ancaman Tambang 2.500 Hektar

Setahun rejim Prabowo-Gibran terasa getir. Bagaimana tidak, ekonomi ekstraktif bukan meredup, tapi justru semakin menguat. Puncaknya? Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

PP ini memberi hak istimewa kepada Koperasi dan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk mengelola wilayah IUP hingga 2.500 hektare. Ini bukan "terobosan ekonomi pro-rakyat." Ini adalah bunuh diri ekologi yang dibungkus rapi dengan narasi populis tentang pemerataan ekonomi.

Konsesi tambang 2.500 hektare itu bukan skala "kecil." Luasan konsesi itu sebanding dengan 3.500 kali lapangan sepak bola standar. Luasan ini, jika diserahkan ke industri tambang, cukup untuk memicu degradasi hutan masif, pencemaran air tak terpulihkan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Janji ekonomi spekulatif dibayar dengan kerugian ekologis yang nyata. Ini adalah pertarungan yang sangat ceroboh.

Mengapa memberikan konsesi tambang jumbo kepada entitas non-tambang seperti Koperasi dan Ormas adalah sebuah malapetaka? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, terkait kapasitas, modal dan keahlian Koperasi dan Ormas dalam mengelola tambang.

Mengelola tambang 2.500 hektare bukan sekadar menggali tanah. Ini adalah operasi teknik sipil, kimia, dan lingkungan yang membutuhkan modal finansial faksasa. Pertambangan bukan hanya pada saat memulai pengeboran, tetapi juga kewajiban pasca-tambang (reklamasi). Proses ini menelan biaya miliaran per hektare dan butuh waktu bertahun-tahun. Kedua, Koperasi dan Ormas tidak memiliki keahlian teknis mumpuni terkait pertambangan. Koperasi/Ormas dibentuk bukan sebagai entitas bisnis pertambangan. Mereka tidak memiliki tata kelola yang memadai untuk standar lingkungan yang ketat.

Sejarah membuktikan bahwa perusahaan tambang besar saja sering mangkir dari kewajiban reklamasi. Potensi kegagalan ini akan berlipat ganda pada Koperasi dan Ormas yang minim modal. Ujung-ujungnya? Negara yang menanggung beban. Uang pajak rakyat di APBN harus digunakan untuk biaya pemulihan. Ingat kasus lumpur panas Sidoarjo? Itu adalah subsidi tak langsung dari rakyat kepada industri yang gagal bertanggung jawab.

Konflik Sosial dan Percepatan Deforestasi

Pemberian IUP tanpa mekanisme tender yang transparan akan meningkatkan potensi konflik agraria dan tumpang tindih lahan. Bukan hanya itu, pemberian konsesi tambang untuk Koperasi dan Ormas juga mengancam kedaulatan pangan. Izin tambang akan membuka wilayah yang sebelumnya adalah lahan produktif pertanian atau bahkan Hutan Adat. Pemerintah secara legal memberi izin untuk menghancurkan kedaulatan pangan dan warisan budaya lokal.

Bukan hanya itu, pemberian konsesi tambang ke Koperasi dan Ormas juga akan memicu terjadinya deforestasi yang super cepat. Motivasi keuntungan komersial jangka pendek dari Koperasi dan Ormas akan menjadi dorongan kuat bagi percepatan laju deforestasi. Hutan diubah menjadi lubang tambang, kerugian ekologisnya jauh melampaui keuntungan finansial sesaat.

Dengan ribuan entitas kecil (Koperasi dan Ormas) bermodal dan keahlian terbatas dalam mengelola tambang akan menyebabkan pengawasan pemerintah lumpuh. Saat ini saja sistem pengawasan sudah kewalahan mengawasi perusahaan tambang besar. Bayangkan bila ada penambahan ribuan titik penambangan baru di bawah bendera Koperasi/Ormas. Bisa dipastikan itu akan menyebabkan pengawasan tidak efektif dan terfragmentasi. Akibatnya, terjadilah kerusakan lingkungan hidup secara sporadis di banyak lokasi. Puncaknya terjadilah bencana ekologi dalam skala luas dan tak terkendali.

Rakyat Harus Melawan Model Pembangunan Ekonomi Ekstraktif Pemerintah tidak boleh menukar keberlanjutan ekosistem dengan janji ekonomi yang rapuh. Lingkungan hidup adalah modal utama dan satu-satunya yang kita miliki. Jika tujuannya adalah pemerataan ekonomi, penyelenggara negara bisa lebih fokus pada penguatan ekonomi restorative, seperti pertanian organik atau ekowisata berbasis komunitas.

PP 39/2025 adalah pengorbanan masa depan demi keuntungan sesaat. Dengan menerbitkan PP ini, rejim Prabowo-Gibran sedang melakukan bunuh diri ekologi. Bunuh diri ekologi ini akan menimpakan bencana pada generasi mendatang.

Publik harus terus bersuara dengan makin lantang melawan model pembangunan ekstraktif yang terus diperkuat di setahun rejim Prabowo-Gibran ini. Generasi mendatang berhak atas pembangunan yang adil dan berkelanjutan, bukan lubang tambang di mana-mana yang merusak alam. Apakah narasi sesat pemerataan ekonomi sebanding dengan kehancuran lingkungan yang masif ini?



KETIKA KESEJAHTERAAN DOSEN BELUM MENJADI PRIORITAS

Oleh

Roy Martin Simamora

Penulis adalah Pengajar Filsafat

Pendidikan PSP ISI Yogyakarta

Sudah hampir satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan. Dalam periode ini, berbagai kebijakan prioritas mulai diarahkan ke sektor pembangunan infrastruktur berskala besar, percepatan proyek Ibu Kota Nusantara, serta pelaksanaan program makan siang gratis (MBG). Pemerintah ingin tampil sebagai rezim yang cepat bekerja dan memiliki visi pembangunan yang tegas. Namun di tengah gegap gempita pembangunan fisik tersebut, ada satu kelompok profesi yang seolah tak masuk radar prioritas negara: para dosen Indonesia.

Para dosen sering disebut sebagai “penjaga nalar bangsa” dan “pencetak masa depan.” Tetapi ironisnya, mereka justru menjadi kelompok yang hidup dalam ketidakpastian. Sementara negara sibuk membangun jalan, jembatan, dan ibu kota baru, mereka harus berjibaku menghadapi realitas kesejahteraan yang tertunda. Harapan besar tentang peningkatan mutu pendidikan tinggi tak mungkin terwujud jika kesejahteraan dosen sendiri dibiarkan mengambang.

Persoalan yang paling mendesak saat ini adalah tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan secara penuh sejak 2020 hingga 2024. Selama empat tahun, ribuan dosen di berbagai perguruan tinggi negeri menunggu hak mereka yang tak kunjung cair. Alasan demi alasan datang silih berganti: peralihan sistem, revisi regulasi, verifikasi administrasi, hingga keterbatasan anggaran. Tetapi tak satu pun alasan tersebut menghapus kenyataan bahwa para dosen harus menanggung beban finansial akibat ketidakpastian negara.

Tukin bukan sekadar bonus tambahan, melainkan bagian penting dari penghasilan bulanan. Bagi sebagian dosen, tunjangan ini menjadi sumber utama untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga, cicilan rumah, biaya pendidikan anak, hingga aktivitas akademik yang sering kali juga harus dibiayai dari kantong pribadi. Ketika tunjangan ini tak dibayarkan, kehidupan mereka secara langsung terguncang. Ini bukan semata soal teknis keuangan, melainkan soal rasa keadilan dan penghargaan terhadap profesi pendidik.

Ketidakpastian tukin ini berlangsung bersamaan dengan masalah lain yang tak kalah serius: stagnasi tunjangan jabatan fungsional. Dosen yang naik jabatan dari Lektor ke Lektor Kepala, atau dari Lektor Kepala ke Guru Besar, sering kali tak merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Gelar akademik naik, beban kerja bertambah, tetapi penghasilan tetap jalan di tempat. Dalam situasi seperti ini, kenaikan jabatan fungsional lebih tampak seperti beban administratif daripada bentuk penghargaan.

Padahal, proses untuk mencapai jabatan akademik lebih tinggi bukanlah jalan singkat. Dosen harus menyusun publikasi ilmiah bereputasi, melakukan penelitian, membimbing mahasiswa, melaksanakan pengabdian masyarakat, dan memenuhi berbagai indikator kinerja lainnya. Semua proses ini membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Namun ketika semua syarat itu terpenuhi, negara tak memberi penghargaan finansial yang setimpal. Ketimpangan antara beban kerja dan penghargaan ini telah lama menjadi keluhan yang tak kunjung ditangani serius oleh pemerintah.

Dampaknya tak berhenti pada kondisi ekonomi semata. Ketidakpastian tunjangan dan stagnasi penghasilan menimbulkan tekanan psikologis dan menurunkan semangat kerja para dosen. Banyak di antara mereka yang akhirnya mencari penghasilan tambahan di luar kampus untuk bertahan hidup. Ada yang menjadi tutor privat, pembicara lepas, penulis komersial, bahkan membuka usaha kecil. Situasi ini membuat energi dan waktu yang seharusnya digunakan untuk riset, menulis, atau mengajar, justru habis untuk mengejar kebutuhan dasar.

Jika kondisi ini terus berlangsung, kualitas pendidikan tinggi akan tergerus secara perlahan namun pasti. Bagaimana mungkin dosen mampu mendorong inovasi, riset unggulan, dan pembelajaran yang bermakna jika mereka sendiri berada dalam kondisi ekonomi yang tak stabil? Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini bisa menciptakan krisis yang lebih dalam: krisis kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi itu sendiri.

Masalah ini sesungguhnya mencerminkan cara pandang negara terhadap sektor pendidikan tinggi. Infrastruktur fisik dibangun dengan cepat dan penuh ambisi, tetapi pembangunan infrastruktur intelektual, yakni manusia penggerak pendidikan, sering kali tertinggal jauh. Negara seakan lebih mudah membangun gedung perkuliahan daripada memastikan orang-orang yang menghidupi gedung tersebut mendapatkan penghargaan yang layak.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah berbicara tentang "bonus demografi", "inovasi", "Indonesia Emas" dan "SDM unggul". Namun semua jargon tersebut akan hampa jika negara tak hadir secara konkret dalam memastikan kesejahteraan dosen. Mereka bukan sekadar pengajar, melainkan peneliti, penulis, pembimbing, penggerak inovasi, dan penjaga nalar kritis bangsa. Tanpa kesejahteraan yang memadai, peran strategis ini akan kehilangan fondasinya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran datang dengan janji membangun negara kuat dan efektif. Tetapi hingga kini, sinyal keberpihakan terhadap kesejahteraan dosen belum benar-benar terlihat. Tunggakan tunjangan belum terselesaikan, tunjangan jabatan fungsional belum direformasi, dan perhatian terhadap penghidupan tenaga pendidik masih tertinggal dari prioritas proyek-proyek fisik berskala besar.

Padahal, menyelesaikan persoalan ini tak hanya soal memenuhi kewajiban administratif negara, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Ketika negara membayar hak dosen dengan adil dan tepat waktu, negara sedang menunjukkan komitmen bahwa kerja intelektual dihargai setara dengan kerja-kerja fisik. Ketika tunjangan jabatan naik seiring peningkatan kinerja akademik, negara sedang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan fondasinya.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata: menyelesaikan pembayaran tunggakan tunjangan 2020-2024, mereformasi sistem tunjangan jabatan fungsional agar selaras dengan beban kerja, dan membangun mekanisme penghargaan yang adil serta transparan. Langkah ini tak hanya akan memperbaiki kesejahteraan dosen, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan daya saing bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kompetitif.

Setahun sudah berlalu sejak rezim ini berdiri. Para dosen tak membutuhkan janji baru, melainkan kepastian. Negara akan diingat bukan hanya dari gedung dan jalan yang dibangun, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan para penjaga ilmu. Karena pada akhirnya, bangsa besar dibangun bukan oleh beton dan baja, melainkan oleh pikiran-pikiran cemerlang yang tumbuh dalam sistem yang adil.



Satu Dua

setahun hari ini kalian berjanji
setahun hari ini jatuh tempo sang
premi
asta cita, PSN, dan persetan
program kalian
nikmat perubahan mana yang
kami rasakan?

coba kalian hitung pelan-pelan

1

2

hanya gugus angka

alamak

apalah arti sebuah nama
banyak-banyak rencana tapi mati
rasa
yang pelik bukan satu atau dua
yang pelik adalah segala

tanah digusur, lidah dibakar
sebut pro demokrasi tapi tak mau
dengar
gerak dibungkam, buku dirampas
sebut cinta negeri ini tapi terus
menindas

kalian dan kaki-kaki sinting
apakah kursi itu terlalu tinggi
terlalu tinggi hingga lupa pada
tanah yang mengangkatmu?

setahun hari ini kalian
menyanggupi
setahun hari ini lebur sana-sini
tak ada keadilan bagi kami
hukum pun masih jadi kompromi

kami tak lupa setahun lalu hari ini
dan kami belum selesai, tidak
sampai kita mati

Jakarta, 14 Oktober 2025

A person in a school uniform, including a cap and tie, is holding a large sign. The background is a light pink color with a faint image of a bicycle wheel.

**SAYA SEDIH
BANYAK MANTAN
MURID SAYA
MENJADI KORUPTOR**

SETAHUN BERSAMA PRABOWO-GIBRAN: GURU YANG MASIH MENGAJAR DI TENGAH JANJI DAN GELISAH

“Kami para guru tidak minta dimuliakan seperti pahlawan, kami hanya ingin didengarkan sebelum kelelahan berubah jadi apatis.”

Sudah hampir setahun rezim Prabowo-Gibran berjalan. Dari layar televisi dan media sosial, banyak yang terlihat berubah. Pidato yang lantang, program yang digembar-gemborkan, dan visi besar tentang transformasi pendidikan nasional. Tapi di ruang kelas tempat saya mengajar, di antara suara anak-anak yang membaca pelan, aku bertanya dalam hati.

Apakah perubahan itu benar-benar sampai ke sini?

Apakah semangat di pusat pemerintahan terasa sampai ke ruang kelas ini?

Sebagai guru, saya tidak bicara dari menara gading. Saya bicara dari ruang kelas, dari lembar modul ajar (atau RPP) yang terus diperbarui mengikuti aturan baru, dan dari hati yang selalu berharap murid-murid saya bisa lebih baik. Dan setelah hampir setahun pemerintahan baru ini berjalan, rasa-rasanya yang paling banyak berubah justru beban.

Setiap kali pemerintah mengumumkan kebijakan baru, kami para guru selalu menjadi ujung tombaknya. Sejak awal tahun, Kementerian Pendidikan mengeluarkan Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, menggantikan aturan lama yang dianggap tidak relevan. Tujuannya baik, yakni menyesuaikan peran guru dengan tuntutan zaman.

Tapi dalam praktiknya, kebijakan itu datang seperti badai kecil. Ia tidak membawa kesejukan. Ia justru mengantarkan kekacauan administratif. Banyak guru harus mengubah laporan, menyesuaikan jam kerja, mempelajari sistem baru, tanpa pendampingan yang memadai (Datadikdasmen, 2025).

Pengurus Besar PGRI bahkan menilai bahwa perubahan kurikulum dan regulasi yang terlalu sering membuat guru sulit beradaptasi. "Setiap ganti pejabat, ganti kurikulum," kata seorang rekan kerja saya sambil tersenyum getir di ruang guru. Senyum yang lebih seperti upaya menertawakan nasib sendiri daripada bentuk optimisme.

Yang paling mencolok di lapangan adalah ketimpangan. Di Jakarta atau kota besar lain, sekolah-sekolah sudah beralih ke kelas pintar, dengan proyektor dan jaringan Wi-Fi yang kuat. Tapi di pelosok Kalimantan, tempat saya mengabdikan, sinyal internet masih naik turun seperti denyut harapan (Beruntung saya berdomisili di ibu kota provinsi, tentu dengan sinyal yang lebih baik...).

Pemerintah memang mencatat ada 4,21 juta guru aktif di Indonesia pada 2025, tapi distribusinya timpang. Sebagian besar di kota, sementara banyak sekolah di pedalaman masih kekurangan tenaga pendidik tetap (Sewaktu.id, 2025). Guru di sana sering harus mengajar tiga mata pelajaran sekaligus karena tidak ada pilihan lain!

Masalah kesejahteraan pun tak kunjung benar-benar membaik. Survei IDEAS dan Dompot Dhuafa (2024) mengungkapkan fakta yang menyakitkan. Sebanyak 74 persen guru honorer di Indonesia masih digaji di bawah dua juta rupiah per bulan. Bahkan satu dari lima di antaranya mendapat bayaran di bawah lima ratus ribu rupiah.

Mereka inilah guru yang membuka sekolah lebih pagi dari siapa pun, mengajar dengan semangat yang kadang lebih besar dari makan siang, dan tetap menulis laporan meski lampu padam karena belum mampu bayar listrik. Di televisi, angka tunjangan dinaikkan. Di lapangan, amplopnya tetap tipis!

Kesejahteraan guru sering dibicarakan sebagai retorika, bukan sebagai realita. Pemerintah memang sudah meluncurkan sejumlah program tunjangan non-ASN, percepatan sertifikasi PPG, bahkan rumah subsidi bagi guru. Tapi banyak di antara kami belum merasakannya secara nyata. Proses administrasi rumit, syarat dokumen berlapis-lapis, dan antrean panjang membuat program itu seperti menara gading. Terlihat menjanjikan, tapi terlalu tinggi untuk dijangkau.

Lalu ada satu hal yang jarang dibicarakan. Ia adalah kelelahan batin! Bukan hanya karena pekerjaan yang berat, tapi karena guru sering merasa berjalan sendirian. Kami dituntut terus berinovasi, sementara pelatihan minim, fasilitas terbatas, dan kebijakan berubah cepat. Murid kami datang dengan beragam persoalan, hal-hal yang tak tertulis di silabus tapi nyata di mata kami.

Kadang saya iri melihat negara lain yang menjadikan guru benar-benar pusat kebijakan. Di Finlandia, misalnya, guru disebut sebagai *architects of the nation's future* (arsitek masa depan bangsa). Tapi di sini, kami sering merasa hanya sebagai "pelaksana kurikulum". Ketika ada perubahan besar, suara guru jarang dimintai. Kebijakan datang dari atas, tanpa mendengar bisik lapangan yang penuh jerit kecil. Top-down policy seperti ini tidak hanya membuat kami lelah, tapi juga membuat inovasi alami dari guru mandek.

Tapi, di tengah semua kegelisahan itu, saya masih punya harapan (karena bagaimana pun, guru tidak pernah benar-benar kehilangan harapan). Kami mungkin sering marah, kecewa, tapi tetap datang ke sekolah setiap pagi. Masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya (asal keberpihakan benar-benar berpihak).

Harapan itu sederhana. Pertama, kebijakan harus berkelanjutan dan berbasis evaluasi, bukan sekadar perubahan kosmetik. Jangan lagi setiap pergantian pejabat berarti pergantian kurikulum dan sistem. Pendidikan butuh kesinambungan, bukan kegaduhan. Kedua, pengakuan penuh terhadap guru sebagai profesional. Beri ruang bagi kami untuk berpendapat, berinovasi, dan dihargai sesuai kompetensi, bukan sekadar status ASN, swasta, atau honorer. Ketiga, dorong otonomi sekolah agar bisa menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal karena pendidikan di NTT tidak sama dengan di Bandung atau Jakarta!

Lebih jauh lagi, saya percaya bahwa kebijakan pendidikan bisa lebih manusiawi jika pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang lahir dari mendengar, bukan dari data semata. Undang guru dari berbagai daerah untuk duduk bersama membuat kebijakan. Biarkan suara mereka menjadi bahan dasar, bukan sekadar catatan pinggir. Bentuk komunitas guru lintas wilayah yang aktif menjadi konsultan lapangan bagi kementerian. Bukan hanya karena mereka tahu apa yang terjadi, tapi karena mereka mengalaminya.

Dan jika bicara masa depan, digitalisasi pendidikan memang tidak bisa dihindari. Tapi digitalisasi tanpa pemerataan adalah jebakan. Banyak sekolah di desa masih bermimpi punya komputer. Mungkin sebaiknya pemerintah mengembangkan platform offline learning kit, yakni materi pembelajaran digital yang bisa dijalankan tanpa internet, agar semua murid, di mana pun, bisa belajar setara.

Semua ini bukan mimpi kosong. Kita hanya butuh kemauan politik yang sungguh-sungguh. Karena kalau yang berubah hanya pidato, maka sekolah akan tetap seperti sekarang: bangunan tua yang diisi semangat muda yang terus diuji oleh kenyataan.

Setahun bukan waktu sebentar untuk menilai arah pemerintahan. Tapi bagi kami, guru, setahun ini belum banyak menjawab kegelisahan. Kami tetap berjuang di ruang-ruang sempit, dengan papan tulis dan murid-murid yang haus masa depan. Kami tidak menolak perubahan, kami hanya ingin diajak bicara tentang arah perubahan itu.

Dan pada akhirnya, bukan Prabowo atau Gibran yang akan menulis masa depan bangsa ini. Kami, para guru, yang akan menuliskannya di hati murid setiap hari, di antara kapur atau spidol yang habis dan janji yang belum ditepati.

**KESEJAHTERAAN GURU
SERING DIBICARAKAN
SEBAGAI RETORIKA.**



